

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Identitas Responden

Identitas ditentukan untuk memberikan gambaran tentang signifikan antara data responden dengan analisis yang dilakukan untuk menjawab tujuan penelitian yang dikaji. Responden dalam penelitian ini adalah persepsi dan respon pelaku usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pangkep.

5.1.1. Umur

Identifikasi responden penelitian dapat ditinjau dari tingkat umur yang dimiliki karena konsepsi umur merupakan faktor yang turut mempengaruhi cara berfikir dan bertindak seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari berdasarkan kematangan dan pengalaman yang telah dijalani selama ini. Berikut adalah persentase umur responden pelaku usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pangkep.

Tabel 11. Identitas Responden Berdasarkan Umur pada Pelaku usaha Warung Makan di Kabupaten Pangkep.

Umur	Jumlah Responden	Persentase (%)
23-35	26	37.68
36-46	32	46.38
47-57	11	15.94
Jumlah	69	100.00
Maksimun: 57		
Minimun : 23		
Rata-Rata : 40		

Sumber : Lampiran 2

Berdasarkan Tabel 11, Identitas responden berdasarkan umur pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa kelompok usia 36–46 tahun merupakan yang paling dominan dengan jumlah 32 responden atau 46,38%.

Menurut Santoso (2020) bahwa pada rentang usia tersebut, pelaku usaha berada pada masa produktif dan stabil, baik dari segi pengalaman maupun kemampuan ekonomi dalam mengelola usaha. Kelompok usia 23–35 tahun berada pada urutan kedua dengan 26 responden atau 37,68%, yang menunjukkan bahwa generasi muda juga cukup aktif dalam menjalankan usaha warung makan. Sementara itu, kelompok usia 47–57 tahun merupakan yang paling sedikit, yaitu hanya 11 responden atau 15,94%. Menurut Yuliana (2019), seiring bertambahnya usia, produktivitas individu dalam kegiatan usaha cenderung mengalami penurunan akibat keterbatasan tenaga, kesehatan, dan adaptasi terhadap perubahan pasar

5.1.2 Pendidikan

Pendidikan adalah sarana untuk mengembangkan diri, sebab dengan pendidikan kita dapat mengukur kemampuan seseorang dalam memecahkan masalah. Persentase pendidikan pelaku usaha warung makan responden dalam usaha warung makan terhadap kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Pangkep.

Tabel 12. Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Pelaku Usaha Warung Makan di Kabupaten Pangkep

Pendidikan	Jumlah responden	Persentase(%)
SD	15	21.74
SMP	14	20.29
SMA	34	49.28
S1	6	8.70
total	69	100.00

Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan Tabel 12, Berdasarkan data, tingkat pendidikan pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa responden terbanyak adalah lulusan SMA, yaitu sebanyak 34 orang atau 49,28%. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas pelaku usaha memiliki pendidikan menengah

yang cukup untuk mendukung keterampilan dasar dalam mengelola usaha. Menurut Fitriani & Lestari (2018), pendidikan menengah memberikan bekal literasi yang cukup bagi pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usaha dan lebih mudah menerima program pembinaan. Responden dengan pendidikan terakhir S1 merupakan yang paling sedikit, yaitu hanya 6 orang atau 8,70%. Rendahnya jumlah ini dapat disebabkan oleh kecenderungan lulusan perguruan tinggi untuk lebih memilih pekerjaan di sektor formal atau profesi sesuai bidang studinya, dibandingkan menjalankan usaha kuliner berskala kecil. Hal ini sejalan dengan pendapat Harini (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan tinggi seringkali berbanding lurus dengan aspirasi kerja formal, sementara usaha mikro lebih banyak digeluti oleh mereka dengan pendidikan menengah..

5.1.3. Sertifikasi Halal

Sertifikasi halal adalah proses penilaian dan pemberian jaminan tertulis dari lembaga berwenang, seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai syariat Islam. Persentase sertifikasi halal pelaku usaha warung makan responden dalam usaha warung makan di Kabupaten Pangkep.

Tabel 13. Identitas responden yang memiliki sertifikasi halal pada Pelaku Usaha Warung Makan di Kabupaten Pangkep

Sertifikas Halal	Jumlah Responden	Persentase (%)
Ya	21	30.43
Tidak	48	69.57
total	69	100.00

Lampiran 4

Berdasarkan Tabel 13, dapat diketahui bahwa pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep dengan jumlah 69 orang pelaku usaha tidak semua memiliki

sertifikasi halal adapun yang memiliki sertifikasi sebanyak 21 orang dengan persentase 30,43% dan yang tidak memiliki ssertifikasi halal sebanyak 48 orang dengan persentase 69,57%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan sertifikasi halal di kalangan pelaku usaha masih tergolong rendah. Rendahnya angka ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan tentang prosedur pengurusan sertifikasi, anggapan bahwa prosesnya rumit atau memerlukan biaya tinggi, serta belum adanya dorongan kuat dari pihak berwenang

5.2. Jenis- Jenis Warung Makan

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) memiliki keragaman jenis warung makan yang mencerminkan kekayaan budaya kuliner lokal serta pengaruh dari luar daerah. Salah satu jenis warung makan yang sangat khas adalah warung pangkep yang identik dengan sajian ikan bolu bakar (bandeng bakar), pepes usus ikan dan sop saudara dan menjadi favorit masyarakat lokal serta pengunjung luar daerah karena menyajikan makanan khas Bugis-Makassar yang otentik. Warung jenis ini menyajikan hasil laut segar seperti ikan, udang, cumi, dan kepiting yang langsung ditangkap oleh nelayan lokal dan dimasak dalam bentuk bakar, goreng, atau rica-rica penggunaan bumbu lokal dan proses masak yang masih tradisional sehingga cita rasanya sangat khas.

Seiring perkembangan zaman dan pengaruh gaya hidup masyarakat urban, terutama generasi muda, muncul pula warung makan modern. Warung jenis ini menawarkan menu seperti nasi padang, nasi kunig, bakso beraneka topping, serta minuman seperti kopi susu, teh tarik, dan minuman berbasis boba. Jenis warung makan yang ada di Kabupaten Pangkep sangat beragam dan mencerminkan

perpaduan antara kekayaan kuliner lokal, adaptasi budaya luar, serta tren konsumsi modern. Keberagaman ini tidak hanya memberikan pilihan yang luas bagi masyarakat dan wisatawan, tetapi juga mencerminkan dinamika ekonomi sektor informal yang bergerak cepat serta menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kebijakan seperti kewajiban sertifikasi halal yang saat ini mulai diterapkan secara menyeluruh. Keberadaan warung-warung tersebut dapat menjadi indikator penting dalam melihat sejauh mana pemahaman, kepatuhan, serta kesiapan pelaku usaha kecil dalam menerapkan standar halal pada produk makanan yang mereka sajikan.

Tabel 14. Jenis-Jenis Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

No.	Jenis	Jumlah	Persentase (%)
1.	Warung Makan Pangkep	43	62,31
2.	Bakso	13	18,84
3.	Coto	6	8,70
4.	Nasi Padang	3	4,34
5.	Nasi Kuning	4	5,80
Jumlah		69	100

Berdasarkan Tabel 14 tentang Jenis-Jenis Warung Makan di Kabupaten Pangkep bahwa warung makan yang paling dominan adalah Warung Makan Pangkep dengan jumlah sebanyak 43 unit atau sekitar 62,31% dari keseluruhan sampel. Hal ini menunjukkan bahwa kuliner khas Pangkep masih menjadi pilihan utama dan memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat maupun pengunjung. Kedua adalah warung bakso dengan jumlah 13 unit atau 18,84%, yang menggambarkan bahwa bakso cukup populer dan menjadi salah satu menu favorit masyarakat. Selanjutnya, warung coto berjumlah 6 unit atau 8,70%, memperlihatkan bahwa makanan khas Bugis-Makassar ini juga memiliki tempat tersendiri di kalangan konsumen. Adapun warung nasi kuning berjumlah 4 unit (5,80%) dan warung nasi Padang sebanyak 3 unit (4,34%). Walaupun jumlahnya

lebih sedikit dibandingkan jenis lainnya, kedua warung ini tetap menunjukkan adanya variasi pilihan makanan di Kabupaten Pangkep, yang memperkaya keragaman kuliner daerah tersebut. Secara keseluruhan, dari 69 warung makan yang menjadi objek penelitian, terlihat bahwa mayoritas pelaku usaha lebih banyak mengembangkan kuliner lokal khas Pangkep dibandingkan jenis makanan lainnya, sekaligus menunjukkan identitas kuliner daerah yang masih kuat dipertahankan.

5.3 Prosedur Pengurusan Sertifikasi Halal

Berikut ini adalah tahapan yang dilewati perusahaan yang akan mendaftar proses sertifikasi halal :

1. Memahami persyaratan sertifikasi halal dan mengikuti pelatihan SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal). Memahami persyaratan sertifikasi halal yang tercantum dalam kriteria Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Perusahaan juga harus mengikuti Pelatihan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) untuk Penyelia Halal.
2. Menerapkan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal, antara lain: komitmen dan tanggung jawab, bahan yang digunakan, proses produk halal, produk, pemantauan dan evaluasi.
3. Menyiapkan dokumen sertifikasi halal yang diperlukan untuk sertifikasi halal, antara lain: Surat Permohonan, Formulir Pendaftaran, Aspek Legal (NIB), Dokumen Penyelia (SK Pengangkatan Tim Mangemen Halal, Daftar Riwayat Hidup, KTP, sertifikat pelatihan penerapan SJPH dan sertifikat lulus uji kompetensi penyelia halal untuk pelaku usaha dengan skala usaha menengah/besar), dan Manual SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal).

4. Permohonan SSTD dan BPJPH, pelaku usaha yang mendaftarkan sertifikasi Halal, wajib melakukan pendaftaran secara Online melalui website siHalal BPJPH (<https://ptsp.halal.go.id/>) dan memiliki Legalitas Izin usaha berupa NIB yang sudah terupdate/terbaru (berbasis RBA), kemudian mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan.
5. Pendaftaran pemeriksaan ke LPPOM MUI Sulawesi Selatan melalui Sistem CEROL (<https://regs.e-lppommui.org/index.php>). Dokumen yang diupload berupa Manual SJPH (Sistem Jaminan Produk Halal), Alur Proses Produksi, Surat Pernyataan Bebas Babi, Bukti Diseminasi Sosialisasi Kebijakan Halal, Bukti Pelatihan Eksternal, NIB, Daftar Produk, Daftar Bahan Baku yang digunakan dan Matrix Penggunaan Bahan untuk Produk).
6. Setelah melakukan pendaftaran di CEROL, perusahaan harus melakukan monitoring pre audit dan pembayaran akad sertifikasi. Monitoring pre audit disarankan dilakukan setiap periode untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil pre audit. Bila terdapat kekurangan dokumen akan dihubungi oleh sekretariat LPPOM MUI Sulawesi Selatan. Pembayaran akad sertifikasi dilakukan dengan cara transfer.
7. pelaksanaan audit dapat dilaksanakan apabila perusahaan sudah lolos pre audit dan akad sudah disetujui. Audit dilaksanakan di semua fasilitas yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi.
8. Setelah melakukan upload data sertifikasi, perusahaan harus melakukan monitoring pasca audit. Monitoring pasca audit disarankan dilakukan setiap

periode untuk mengetahui adanya ketidaksesuaian pada hasil audit, dan jika terdapat ketidaksesuaian agar dilakukan perbaikan.

9. Perusahaan dapat memperoleh Ketetapan Halal dalam bentuk Hardcopy. Ketetapan Halal yang asli dapat diambil di kantor LPPOM MUI Sulawesi Selatan atau dapat juga dikirim ke alamat perusahaan. Ketetapan Halal berlaku selama 4 (empat) tahun.
10. Ketetapan Halal yang diperoleh akan menjadi dasar penerbitan Sertifikat Halal di SIHALAL oleh BPJPH.

5.4 Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal

Berikut penerapan kewajiban sertifikasi halal:

1. Pendampingan Sertifikasi Halal merupakan upaya pemerintah daerah, lembaga terkait, maupun pendamping proses produk halal (PPPH) untuk membantu pelaku usaha - khususnya UMKM - dalam memahami dan menjalani proses sertifikasi halal. Pendampingan meliputi penjelasan dokumen yang diperlukan, tata cara pengisian formulir di sistem OSS dan SiHalal, hingga bantuan teknis saat proses audit. Tujuannya adalah meminimalkan hambatan administratif dan memastikan pelaku usaha dapat menyelesaikan pengajuan sertifikasi secara benar dan cepat.
2. Sosialisasi dan Edukasi kegiatan ini berfokus pada penyebaran informasi dan pemahaman kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya sertifikasi halal, prosedur yang harus ditempuh, serta manfaat yang dapat diperoleh. Sosialisasi dapat dilakukan melalui seminar, penyuluhan langsung. Edukasi juga menekankan bahwa sertifikasi halal bukan hanya kewajiban

hukum, tetapi juga sarana meningkatkan kepercayaan konsumen dan daya saing produk.

3. Pengawasan Produk Halal dilakukan oleh instansi berwenang, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Satpol PP bekerja sama dengan BPJPH atau MUI, untuk memastikan produk yang beredar telah memiliki sertifikat halal dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pengawasan mencakup pemeriksaan label, komposisi bahan, proses produksi, serta kepatuhan terhadap prosedur penyimpanan dan distribusi. Jika ditemukan pelanggaran, pelaku usaha dapat diberi teguran, sanksi administratif, atau tindakan hukum sesuai aturan.
4. Fasilitas Sertifikat Halal ini biasanya berupa bantuan biaya sertifikasi halal, terutama untuk pelaku UMKM yang memiliki keterbatasan modal. Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi, beasiswa sertifikasi, atau program sertifikasi gratis (*self declare*) bagi usaha dengan risiko bahan rendah. Fasilitas ini diharapkan dapat memperluas jumlah pelaku usaha bersertifikat halal, sehingga produk lokal lebih mudah masuk pasar yang mensyaratkan label halal.

5.5 Persepsi Pelaku Usaha

Persepsi adalah tanggapan atau gambaran langsung dari suatu serapan seseorang dalam mengetahui beberapa hal melalui panca indra. Dalam pengertian ini jelas, bahwa persepsi adalah kesan gambaran atau tanggapan yang dimiliki seseorang setelah orang tersebut menyerap untuk mengetahui beberapa hal (objek), melalui panca indra. Hasil penelitian tanggapan responden mengenai variabel persepsi sebagai berikut:

5.5.1 Persepsi Internal

Persepsi internal adalah pandangan atau penilaian yang terbentuk dari faktor-faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti pengetahuan, pengalaman, keyakinan, motivasi, dan sikap pribadi. Persepsi ini bersifat subjektif karena dipengaruhi oleh latar belakang, nilai, serta kondisi psikologis individu. Variasi jawaban responden untuk indikator persepsi internal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15. Persepsi Internal Pada Indikator Yakin Usaha Berkembang Jika Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	1	1,45	1
2.	Kurang Setuju	2	22	31,88	44
3.	Netral	3	33	47,83	99
4.	Setuju	4	10	14,49	40
5.	Sangat Setuju	5	3	4,35	15
Total			69	100,00	199

Sumber: *Lampiran 3*

Berdasarkan Tabel 15 mengenai persepsi internal pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep terhadap indikator keyakinan bahwa usaha akan berkembang jika bersertifikasi halal, terlihat bahwa jawaban tertinggi berada pada kategori netral dengan jumlah 33 responden atau 47,83% dengan total skor 99. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha berada pada posisi ragu atau belum memiliki keyakinan yang pasti terkait manfaat langsung sertifikasi halal terhadap perkembangan usaha mereka. Sementara itu, respon terendah berada pada kategori tidak setuju dengan jumlah hanya 1 responden atau 1,45% dengan total skor 1. Rendahnya jumlah responden pada kategori ini mengindikasikan bahwa hampir semua pelaku usaha tidak sepenuhnya menolak manfaat sertifikasi halal,

meskipun sebagian besar masih berada pada posisi ragu-ragu. Hal ini sesuai dengan penelitian Nurhayati (2021) yang menekankan pentingnya literasi halal dan pendampingan usaha untuk mendorong perubahan persepsi dari netral menuju keyakinan positif.

Tabel 16. Persepsi Internal Pada Indikator Termotivasi Mengurus Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	1	1,45	1
2.	Kurang Setuju	2	20	28,99	40
3.	Netral	3	33	47,83	99
4.	Setuju	4	22	16,94	88
5.	Sangat Setuju	5	4	5,80	20
Total			69	100,00	248

Sumber: *Lampiran 3*

Berdasarkan Tabel 16 mengenai persepsi internal pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep terhadap indikator motivasi mengurus sertifikasi halal, terlihat bahwa respon tertinggi berada pada kategori Netral dengan jumlah 33 responden atau 47,83% dengan total skor 99. Hal ini menunjukkan bahwa hampir separuh pelaku usaha berada pada posisi ragu-ragu. Sikap netral ini dapat disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai manfaat sertifikasi halal, dan persepsi bahwa proses sertifikasi rumit. Menurut Suryani (2020), salah satu penyebab rendahnya motivasi UMKM dalam mengurus sertifikasi halal adalah ketidaktahuan prosedur, biaya, serta kurangnya pendampingan yang membuat mereka cenderung bersikap pasif. Sementara itu, respon terendah berada pada kategori tidak setuju dengan jumlah hanya 1 responden atau 1,45% dengan total skor 1. Hal ini menunjukkan bahwa hampir semua pelaku usaha tidak menolak

secara mutlak kewajiban sertifikasi halal, meskipun banyak yang masih bersikap ragu-ragu.

Tabel 17. Persepsi Internal Pada Indikator Percaya Halal Bukan Hanya Label Tapi Bagian dari Nilai Usaha Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	0	0	0
2.	Kurang Setuju	2	21	30,43	42
3.	Netral	3	31	44,93	93
4.	Setuju	4	13	18,84	52
5.	Sangat Setuju	5	4	5,80	20
Total			69	100,00	207

Sumber: *Lampiran 3*

Berdasarkan Tabel 17, Persepsi internal pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap percaya halal bukan sekedar label tapi bagian dari nilai usaha warung makan menunjukkan bahwa tidak ada berada pada kategori tidak setuju, Selanjutnya, 21 orang dengan total skor 42 persentase 20,29% berada pada kategori kurang setuju, 31 orang dengan total skor 93 persentase 44,93% pada kategori netral, 13 orang dengan total skor 52 persentase 25,12% pada kategori setuju, 4 orang dengan total skor 20 persentase 9,66% yang berada pada kategori sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun sebagian pelaku usaha mulai mengakui pentingnya nilai halal dalam usaha, masih banyak yang bersikap ragu-ragu, sehingga diperlukan penguatan pemahaman tentang peran sertifikasi halal sebagai bagian dari nilai dan identitas usaha.

Tabel 18. Rekapitulasi Variabel Persepsi Internal Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

Kesesuaian Spesifikasi	Skor	Kategori
Yakin usaha berkembang jika bersertifikasi	199	
Termotivasi mengurus karna kesadaran	248	
Percaya halal bukan sekedar label	207	
Jumlah	654	Netral

Sumber: *Lampiran 3*

Berdasarkan Tabel 18, dapat disimpulkan bahwa total indikator respon kognitif pelaku usaha warung makan di kabupaten pangkep memiliki skor 654 yang artinya persepsi internal pelaku usaha masih berada pada tingkat keragu-raguan, belum sepenuhnya positif maupun negatif, sehingga diperlukan strategi sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif untuk membangun keyakinan dan motivasi yang lebih kuat terhadap pentingnya sertifikasi halal..

5.5.2 Persepsi Eksternal

Persepsi eksternal adalah pandangan atau penilaian yang terbentuk dari pengaruh faktor-faktor di luar diri individu, seperti lingkungan sosial, tuntutan konsumen, kebijakan pemerintah, media, maupun kondisi ekonomi. Persepsi ini muncul karena adanya rangsangan atau dorongan dari pihak eksternal yang memengaruhi cara pandang seseorang. Variasi jawaban responden untuk indikator persepsi eksternal dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 19. Persepsi Eksternal Pada Indikator Sosialisasi Dari Pemerintah Terhadap Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	5	7,25	5
2.	Kurang Setuju	2	32	46,38	64
3.	Netral	3	24	34,78	72
4.	Setuju	4	7	10,14	28
5.	Sangat Setuju	5	1	1,45	5
	Total		69	100,00	174

Berdasarkan Tabel 19 mengenai persepsi eksternal pada indikator sosialisasi dari pemerintah terhadap pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep, terlihat bahwa respon tertinggi berada pada kategori netral dengan jumlah 24 responden atau 34,78% dengan total skor 72. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih berada pada posisi ragu atau belum memiliki pandangan yang tegas terkait efektivitas sosialisasi pemerintah mengenai sertifikasi halal. Respon terendah berada pada kategori Sangat Setuju dengan jumlah hanya 1 responden atau 1,45% dengan total skor 5. Rendahnya angka ini memperlihatkan bahwa hanya sedikit pelaku usaha yang benar-benar merasakan manfaat sosialisasi pemerintah secara maksimal. Hal ini sejalan dengan temuan Fauzi (2021) yang menekankan bahwa peningkatan kualitas sosialisasi akan berdampak langsung pada perubahan persepsi positif pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Tabel 20. Persepsi Eksternal Pada Indikator Regulasi Sertifikasi Halal Mudah Dipahami Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	4	5,80	4
2.	Kurang Setuju	2	23	33,33	46
3.	Netral	3	36	52,17	108
4.	Setuju	4	4	5,80	16
5.	Sangat Setuju	5	2	2,90	10
Total			69	100,00	184

Sumner: *Lampiran 4*

Berdasarkan Tabel 20, Persepsi Eksternal pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap regulasi sertifikasi halal menunjukkan bahwa pelaku usaha memilih kategori tertinggi yaitu netral dengan frekuensi 36 orang atau 52,17% dengan total skor 108 sebagian besar pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep masih ragu-ragu atau belum memiliki sikap yang tegas. Respon

dengan frekuensi terendah terdapat pada kategori sangat setuju yakni hanya 2 orang atau 2,90% dengan total skor 10. Rendahnya persentase ini menandakan bahwa hanya sedikit pelaku usaha yang memiliki keyakinan penuh. Pentingnya peningkatan intensitas sosialisasi, edukasi, serta pendampingan langsung agar pelaku usaha tidak hanya berada pada posisi netral, tetapi juga terdorong untuk mendukung dan meyakini manfaat sertifikasi halal secara nyata. Penekanan strategi komunikasi yang partisipatif juga diperlukan agar persepsi positif terhadap kebijakan ini dapat meningkat (Putri & Astuti, 2020).

Tabel 21. Persepsi Eksternal Pada Indikator Pemerintah Peduli Dalam Mendampingi Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	6	8,70	6
2.	Kurang Setuju	2	35	50,75	70
3.	Netral	3	23	33,33	69
4.	Setuju	4	4	5,80	16
5.	Sangat Setuju	5	1	1,45	5
Total			69	100,00	166

Sumber: *Lampiran 4*

Berdasarkan hasil pada Tabel 21, indikator mengenai persepsi pelaku usaha terhadap kepedulian pemerintah dalam mendampingi usaha warung makan di Kabupaten Pangkep menunjukkan bahwa jawaban terbanyak adalah kategori Kurang Setuju dengan frekuensi 35 responden atau 50,75% dan total skor 70 sebagian besar pelaku usaha merasa bahwa kepedulian pemerintah dalam memberikan pendampingan, khususnya terkait sertifikasi halal, masih belum optimal sedangkan frekuensi terendah terdapat pada kategori sangat setuju yaitu hanya 1 responden atau 1,45% dengan total skor 5. Rendahnya tingkat keyakinan

ini menunjukkan bahwa sangat sedikit pelaku usaha yang benar-benar merasakan perhatian penuh pemerintah dalam bentuk pendampingan yang nyata.

Tabel 22. Persepsi eksternal Pada Indikator Akses Informasi Halal Sudah Bisa Diakses Secara Online Terhadap Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	3	4,35	3
2.	Kurang Setuju	2	23	33,33	69
3.	Netral	3	29	42,03	87
4.	Setuju	4	13	18,84	52
5.	Sangat Setuju	5	1	1,45	5
Total			69	100	216

Sumber: *Lampiran 4*

Berdasarkan hasil pada Tabel 22, indikator mengenai akses informasi halal yang sudah bisa diakses secara online menunjukkan bahwa jawaban terbanyak berada pada kategori netral dengan frekuensi 29 responden atau 42,03% dan total skor 87 sedangkan kategori terendah diperoleh pada kategori sangat setuju, yaitu hanya 1 responden atau 1,45% dengan total skor 5. Rendahnya persentase ini menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pelaku usaha yang merasa akses informasi halal secara online benar-benar mudah, praktis, dan bermanfaat dalam mendukung pengurusan sertifikasi halal. Faktor yang mungkin memengaruhi kondisi ini adalah masih kurangnya integrasi sistem informasi halal yang sederhana, adanya anggapan bahwa proses online tetap rumit, serta belum terbiasanya pelaku usaha menggunakan layanan digital. Penelitian oleh Nurlinda & Natsir (2021) menegaskan bahwa meskipun pemerintah telah menyediakan sistem layanan sertifikasi halal online (SiHalal), sebagian besar UMKM masih lebih banyak mengandalkan cara konvensional karena keterbatasan pemahaman dan keterampilan teknologi.

Tabel 23. Persepsi Eksternal Pada Indikator Dukungan Lingkungan Membuat Yakin Untuk Mengurus Sertifikasi Terhadap Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	1	1,45	1
2.	Kurang Setuju	2	6	8,70	12
3.	Netral	3	41	59,42	123
4.	Setuju	4	15	21,73	60
5.	Sangat Setuju	5	6	8,70	30
Total			69	100,00	226

Sumber: *Lampiran 4*

Berdasarkan Tabel 23, indikator mengenai dukungan lingkungan dalam menumbuhkan keyakinan untuk mengurus sertifikasi halal menunjukkan bahwa responden tertinggi berada pada kategori netral dengan frekuensi 41 responden atau 59,42% dan total skor 123 sedangkan terendah berada pada kategori tidak setuju, yakni hanya 1 responden atau 1,45% dengan total skor 1. Dengan demikian, tingginya respon netral dan rendahnya tidak setuju mencerminkan bahwa pelaku usaha berada pada tahap pertimbangan, di mana mereka belum sepenuhnya yakin bahwa lingkungan sekitar benar-benar memberikan dorongan untuk mengurus sertifikasi halal. Faktor ini menegaskan pentingnya peningkatan kampanye kolektif, sosialisasi berbasis komunitas, serta dukungan dari asosiasi pedagang agar lingkungan sekitar lebih berperan dalam mendorong keyakinan pelaku usaha. Sebagaimana ditegaskan oleh Hidayat & Nurhayati (2021), kolaborasi komunitas dan dukungan sosial mampu memperkuat komitmen UMKM dalam menerapkan sertifikasi halal secara konsisten.

Tabel 24. Rekapitulasi Variabel Persepsi Eksternal Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

Kesesuaian Spesifikasi	Skor	Kategori
Sosialisasi sertifikasi halal dari pemerintah cukup membantu	174	
Regulasi sertifikasi halal mudah dipahami	184	
Pemerintah daerah cukup peduli dalam mendampingi Pelaku Usaha	166	
Akses informasi sertifikasi halal sudah mudah diakses secara online	216	
Dukungann dari lingkungan membuat yakin mengurus sertifikasi halal	226	
Jumlah	966	Netral

Sumber: *Lampiran 4*

Berdasarkan Tabel 24, rekapitulasi variabel persepsi eksternal pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep menunjukkan total skor keseluruhan sebesar 966 yang berada pada kategori *Netral*. Rinciannya, indikator sosialisasi sertifikasi halal dari pemerintah cukup membantu memperoleh skor 174, regulasi sertifikasi halal mudah dipahami sebesar 184, pemerintah daerah cukup peduli dalam mendampingi pelaku usaha sebesar 166, akses informasi sertifikasi halal sudah mudah diakses secara online sebesar 216, dan dukungan dari lingkungan membuat yakin mengurus sertifikasi halal sebesar 226. Dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku usaha terhadap persepsi eksternal berada pada tingkat netral, di mana mereka belum sepenuhnya atau masih ragu-ragu merasakan kemudahan, dukungan, dan kepedulian pemerintah maupun lingkungan dalam proses pengurusan sertifikasi halal.

5.6 Respon Pelaku Usaha

Respon adalah sesuatu yang ditimbulkan oleh proses pengamatan yang akan membentuk sikap setuju atau tidak setuju, senang atau tidak dan menerima atau

tidak menerima. Hasil penelitian tanggapan responden mengenai variabel respon kognitif, respon afektif dan respon konatif.

5.6.1 Respon Kognitif

Respon kognitif adalah respon yang kuat hubungannya dengan pengetahuan, keterampilan dan informasi seseorang terhadap sesuatu. Respon ini muncul saat adanya perubahan pada sesuatu yang dimengerti atau tanggapan dari banyak orang. Jawaban responden terhadap indikator respon kognitif didasarkan pada respon pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang diberikan kepada responden. Variasi jawaban responden untuk indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 25. Respon Kognitif pada Indikator pengetahuan kewajiban sertifikasi halal Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	23	33,33	23
2.	Kurang Setuju	2	18	26,09	36
3.	Netral	3	9	13,04	27
4.	Setuju	4	13	18,84	52
5.	Sangat Setuju	5	6	8,70	30
Total			69	100,00	168

Sumber: *Lampiran 5*

Berdasarkan Tabel 25 mengenai respon kognitif pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep terhadap pengetahuan kewajiban sertifikasi halal, terlihat bahwa jawaban tertinggi berada pada kategori tidak setuju dengan jumlah 23 responden (33,33%) dengan total skor 23. Sementara itu, respon terendah berada pada kategori sangat setuju dengan jumlah 6 responden (8,70%) dengan total skor 30. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha masih kurang memahami atau belum memiliki pengetahuan yang memadai mengenai kewajiban

sertifikasi halal. Rendahnya tingkat pemahaman ini dapat disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari pemerintah maupun lembaga terkait, serta kurangnya akses informasi yang mudah dipahami oleh pelaku usaha. Menurut penelitian Anggriani et al. (2024), rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap prosedur sertifikasi halal menjadi faktor utama yang menghambat kesadaran mereka dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Tabel 26. Respon Kognitif pada Indikator Mengetahui Lembaga Yang Mengeluarkan kewajiban sertifikasi halal Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	28	40,58	28
2.	Kurang Setuju	2	16	23,19	32
3.	Netral	3	11	15,94	33
4.	Setuju	4	11	15,94	44
5.	Sangat Setuju	5	3	4,35	15
Total			69	100,00	152

Sumber: *Lampiran 5*

Berdasarkan Tabel 26 mengenai respon kognitif pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep terhadap indikator mengetahui lembaga yang mengeluarkan kewajiban sertifikasi halal, terlihat bahwa jawaban tertinggi berada pada kategori tidak setuju dengan jumlah 28 responden atau 40,58% dengan total skor 28. Respon terendah berada pada kategori sangat setuju dengan jumlah 3 responden atau 4,35% dengan total skor 15. Hal ini memperlihatkan bahwa hanya sedikit pelaku usaha yang benar-benar memiliki pengetahuan yang baik mengenai lembaga penerbit sertifikasi halal. Menurut Nasrullah dan Prabowo (2020) bahwa rendahnya tingkat pengetahuan pelaku usaha terkait BPJPH menjadi salah satu faktor yang menghambat implementasi kewajiban sertifikasi halal di tingkat UMKM.

Tabel 27. Respon Kognitif pada Indikator Memahami Tahapan Pendaftaran sertifikasi halal Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	28	40,58	28
2.	Kurang Setuju	2	17	24,64	34
3.	Netral	3	8	11,59	24
4.	Setuju	4	13	18,84	52
5.	Sangat Setuju	5	3	4,35	15
Total			69	100,00	153

Sumber: *Lampiran 5*

Berdasarkan Tabel 27 mengenai respon kognitif pada indikator pemahaman tahapan pendaftaran sertifikasi halal, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berada pada kategori tidak setuju” dengan frekuensi 28 responden atau 40,58% dan total skor 28 sebagian besar pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep masih belum memahami dengan baik prosedur atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pendaftaran sertifikasi halal sedangkan responden berapa pada kategori rendah dengan nilai netral hanya berjumlah 8 orang atau 11,59%, sebagian kecil pelaku usaha berada pada posisi ragu-ragu atau belum memiliki kepastian terkait pemahaman prosedur sertifikasi halal menurut penelitian Arifin (2021) menegaskan bahwa kurangnya pemahaman prosedur menyebabkan banyak UMKM belum terdorong secara aktif dalam proses sertifikasi halal, meskipun mereka sebenarnya menyadari pentingnya label halal.

Tabel 28. Respon Kognitif pada Indikator Mengetahui Manfaat Sertifikasi Halal sertifikasi halal Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Total Skor	Persentase (%)
1.	Tidak Setuju	1	13	13	18,84
2.	Kurang Setuju	2	20	40	28,90
3.	Netral	3	15	45	21,70
4.	Setuju	4	14	56	20,29
5.	Sangat Setuju	5	7	35	10,14
Total			69	189	100,00

Berdasarkan Tabel 28, respon kognitif pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap mengetahui manfaat sertifikasi halal pelaku usaha menunjukkan bahwa kategori tertinggi terdapat pada frekuensi kurang setuju total skor 40 (18,84%) dan kategori terendah terdapat pada frekuensi sangat setuju 7 total skor 35 (10,14). Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan pengalaman langsung maupun kurangnya informasi praktis mengenai dampak positif sertifikasi terhadap perkembangan usaha. Menurut Penelitian Kurniawan (2021), bahwa meskipun pelaku UMKM pernah mendengar tentang sertifikasi halal, sebagian besar masih belum dapat menilai manfaat nyata yang diperoleh setelah proses sertifikasi dijalankan.

Tabel 29. Rekapitulasi Variabel Respon Kognatif Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep. .

Kesesuaian Spesifikasi	Skor	Kategori
Mengetahui Sertifikasi Halal	168	
Mengetahui lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal	152	
Memahami tahapan pendaftrara sertifikasi	153	
Mengetahui manfaat sertifikasi halal	189	
Jumlah	662	Kurang Setuju

Sumber: *Lampiran 5*

Berdasarkan Tabel 29, rekapitulasi variabel respon kognatif pelaku usaha warung makan kesesuaian spesifik mengetahui sertifikasi halal dengan skor 168, mengetahui lembaga yang mengeluarkan sertifikasi halal dengan skor 152, memahami tahapan pendaftaran sertifikasi halal dengan skor 153 dan mengetahui manfaat sertifikasi halal dengan skor 189 dapat disimpulkan bahwa total indikator respon kognitif pelaku usaha warung makan di kabupaten pangkep memiliki skor 662 yang artinya pelaku usaha warung makan masih kurang pengetahuan, keterampilan dan informasi mengenai kewajiban sertifikasi halal.

5.6.2 Respon Afektif

Respon afektif adalah respon yang berkaitan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu. Respon ini muncul jika terdapat perubahan yang digemari oleh masyarakat terhadap sesuatu. Jawaban responden terhadap indikator respon kognitif didasarkan pada respon pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang diberikan kepada responden. Variasi jawaban responden untuk indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 30. Respon Afektif pada Indikator menyadari pentingnya sertifikasi halal Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep meningkatkan kepercayaan konsumen .

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	3	4,35	3
2.	Kurang Setuju	2	20	28,98	40
3.	Netral	3	32	46,38	96
4.	Setuju	4	11	15,94	44
5.	Sangat Setuju	5	3	4,35	15
Total			69	100,00	198

Sumber: *Lampiran 6*

Berdasarkan Tabel 30 mengenai respon afektif pelaku usaha warung makan pada indikator menyadari pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, terlihat bahwa kategori dengan nilai tertinggi adalah netral sebanyak 32 responden atau 46,38% dengan total skor 96 sebagian besar pelaku usaha masih ragu-ragu atau belum memiliki sikap yang tegas mengenai sejauh mana sertifikasi halal benar-benar berperan dalam meningkatkan kepercayaan konsumen. Sementara itu, nilai terendah berada pada kategori tidak setuju dan sangat setuju masing-masing dengan jumlah responden hanya 3 orang atau 4,35%. Rendahnya respon tidak setuju menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil pelaku

usaha yang benar-benar tidak percaya pada peran sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.

Tabel 31. Respon Afektif pada Indikator tertarik mempelajari proses sertifikasi halal Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	1	1,45	1
2.	Kurang Setuju	2	15	2,74	30
3.	Netral	3	38	55,07	114
4.	Setuju	4	11	15,94	44
5.	Sangat Setuju	5	4	5,80	20
Total			69	100,00	209

Sumber: *Lampiran 6*

Berdasarkan Tabel 31, respon afektif pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap kesadaran pentingnya memiliki sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori tidak setuju yaitu sebanyak 1 orang dengan total skor persentase 1 persentase 1,45%. Selanjutnya, 15 orang dengan total skor 30 persentase 2,74% berada pada kategori kurang setuju, 38 responden dengan total skor 114 persentase 55,07% pada kategori netral, 11 responden dengan total skor 44 persentase 15,94% pada kategori setuju, 4 responden dengan total skor 20 persentase 5,80 % yang berada pada kategori sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pelaku usaha warung tentang kesadaran mengenai pentingnya sertifikasi halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen kondisi ini mengidentifikasi bahwa tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap kesadaran masih rendah sehingga diperlukan peningkatan sosialisasi dan informasi yang lebih luas agar kesadaran mereka dapat meningkat.

Tabel 32. Respon Afektif pada Indikator Bertanggung Jawab Terhadap Kehalalan Pelaku Usaha Warung di Kabupaten Pangkep Untuk Konsumen.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	1	1,45	1
2.	Kurang Setuju	2	1	1,45	2
3.	Netral	3	20	28,98	60
4.	Setuju	4	41	59,42	164
5.	Sangat Setuju	5	6	8,70	30
Total			69	100,00	257

Sumber : *Lampiran 6*

Berdasarkan Tabel 32, respon afektif pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap merasa bertanggung jawab terhadap kehalalan warung makan bagi konsumen pmenunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori tidak setuju yaitu sebanyak 1 orang dengan total skor persentase 1 persentase 1,45% Selanjutnya, 1 orang dengan total skor 2 persentase 1,45% berada pada kategori kurang setuju, 20 orang dengan total skor 60 persentase 28,98% pada kategori netral, 41 orang dengan total skor 164 persentase 59,42% pada kategori setuju, 6 orang dengan total skor 30 presentase 8,70% yang berada pada kategori sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep memiliki kesadaran terhadap tanggung jawab kehalalan yang mereka jual.

Tabel 33. Rekapitulasi Variabel Respon Afektif Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

Kesesuaian Spesifikasi	Skor	Kategori
Menyadari pentingnya sertifikasi halal	198	
Tertarik dalam mempelajari proses sertifikasi halal	209	
Merasa Bertanggung Jawab Kehalalan bagi konsumen	257	
Jumlah	664	Netral

Sumber: *Lampiran*

Berdasarkan Tabel 33, menunjukkan bahwa rekapitulasi variabel respon afektif pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep kesesuaian spesifik respon menyadari pentingnya sertifikasi halal dengan skor 198, tertarik dalam mempelajari proses sertifikasi halal dengan skor 209 dan merasa bertanggung jawab kehalalan bagi konsumen dengan skor 257 dapat disimpulkan bahwa total indikator respon kognitif pelaku usaha warung makan di kabupaten pangkep memiliki skor 664 yang artinya pelaku usaha warung makan masih dominan menyadari pentingnya sertifikasi halal, masih berfikir-fikir dalam mempelajari proses sertifikasi halal dan tanggung jawab juga.

5.5.3 Respon Konatif

Respon konatif (indikator) adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan. Jawaban responden terhadap indikator respon konatif didasarkan pada respon pertanyaan-pertanyaan seperti yang terdapat dalam kuisioner yang diberikan kepada responden. Variasi jawaban responden untuk indikator kinerja dapat dilihat sebagai berikut

Tabel 34. Respon Konatif Pada Indikator Pernah Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Warung Makan Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	15	2,74	15
2.	Kurang Setuju	2	32	46,38	64
3.	Netral	3	12	17,39	36
4.	Setuju	4	9	13,04	36
5.	Sangat Setuju	5	1	1,45	5
Total			69	100,00	156

Sumber: *Lampiran 7*

Berdasarkan Tabel 34, Respon konatif pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap pernah mengikuti pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan

produk bagi konsumen menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori tidak setuju yaitu sebanyak 15 orang dengan total skor persentase 15 persentase 2,74% Selanjutnya, 32 orang dengan total skor 64 persentase 46,38% berada pada kategori kurang setuju, 12 orang dengan total skor 36 persentase 17,39% pada kategori netral, 9 orang dengan total skor 36 persentase 13,04% pada kategori setuju, 1 orang dengan total skor 5 persentase 1,45% yang berada pada kategori sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep dengan kategori tertinggi terdapat pada kurang setuju atau kurang yang sudah mengikuti sosialisasi mengenai sertifikasi halal.

Tabel 35. Respon Konatif Pada Indikator Mengumpulkan Dokumen Untuk Mengurus Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	32	46,38	32
2.	Kurang Setuju	2	13	18,84	26
3.	Netral	3	9	13,04	27
4.	Setuju	4	12	17,39	48
5.	Sangat Setuju	5	3	4,35	15
Total			69	100,00	148

Sumber: *Lampiran 7*

Berdasarkan Tabel 35, Respon konatif sudah mengumpulkan dokumen untuk pengurusan menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori tidak setuju yaitu sebanyak 32 orang dengan total skor persentase 32 persentase 21,62% Selanjutnya, 13 orang dengan total skor 26 persentase 17,57% berada pada kategori kurang setuju, 9 orang dengan total skor 27 persentase 18,24% pada kategori netral, 12 orang dengan total skor 48 persentase 32,43% pada kategori setuju, 3 orang dengan total skor 15 persentase 10,14% yang berada pada kategori sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha warung makan

di Kabupaten Pangkep masih banyak kurang setuju atau belum dalam mengumpulkan dokumentasi untuk pengurusan sertifikasi halal.

Tabel 36. Respon Konatif Pada Indikator Berinisiatif Mencari Informasi Tentang Mengurus Sertifikasi Halal Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

No	Alternatif Jawaban Responden	Skor	Frekuensi	Persentase (%)	Total Skor
1.	Tidak Setuju	1	0	0	0
2.	Kurang Setuju	2	8	11,59	16
3.	Netral	3	47	68,12	141
4.	Setuju	4	11	15,94	44
5.	Sangat Setuju	5	3	4,35	15
Total			69	100,00	216

Sumber: *Lampiran 7*

Berdasarkan Tabel 36, Respon konatif pelaku usaha warung di Kabupaten Pangkep terhadap berinisiatif mencari informasi tentang sertifikasi halal menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori tidak setuju yaitu tidak ada Selanjutnya, 8 orang dengan total skor 16 persentase 11,59% berada pada kategori kurang setuju, 47 orang dengan total skor 141 persentase 68,12% pada kategori netral, 11 orang dengan total skor 44 persentase 15,94% pada kategori setuju, 3 orang dengan total skor 15 persentase 4,35% yang berada pada kategori sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep kurang inisiatif dalam mencari informasi tentang mengurus sertifikasi halal.

Tabel 37. Rekapitulasi Variabel Respon Konatif Pelaku Usaha Warung Makan Di Kabupaten Pangkep.

Kesesuaian Spesifikasi	Skor	Kategori
Pernah mengikuti sosialisasi	156	
Sudah mengumpulkan dokumen	148	
Berinisiatif mencari informasi	216	
Jumlah	520	Kurang Setuju

Sumber: *Lampiran 7*

Berdasarkan Tabel 37, menunjukkan bahwa rekapitulasi variabel respon konatif pelaku usaha warung makan di Kabupaten Pangkep kesesuaian spesifikasi spesifikasi pernah mengikuti sosialisasi dengan skor 156, sudah mengumpulkandokumen dengan skor 148 dan berinisiatif mencari informasi dengan skor 216 dapat disimpulkan bahwa total indikator respon kognitif pelaku usaha warung makan di kabupaten pangkep memiliki skor 520 yang artinya pelaku usaha warung makan masih kurang yang pernah mengikuti sosialisasi, mengumpulkan dokumen dan kurang berinisiatif mencari informasi mengenai sertifikasi halal.